

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

RISKA WIDI ASTUTI

1816021012



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM POLICY IN 2020 BAPPEDA OF LAMPUNG PROVINCE

BY

RISKA WIDI ASTUTI

Technological developments in the current era are very rapid and can be used as opportunities for the central government to retrieve fast, precise and accurate data in overcoming various problems, one of which is problems in regional development. The Local Government Information System (SIPD) is a data-based system, which can be expected to produce accurate planning data. -The research objective is to find out the implementation of the local government information system policy in the Bappeda of Lampung Province. The theory used is Edward III. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of the research are: First, on communication indicators, the application of the Local Government Information System has good communication between OPDs-so that the clarity of the purpose of this system is understood by individuals who are responsible for achieving goals. Second, indicators of resources, existing facilities are adequate, and the existing human resources are quite competent. Third, indicators of disposition or attitude. implementation of this system received a positive response. Bappeda Lampung Province has a commitment and responsibility to achieve a common goal. Fourth, the bureaucratic structure, data monitoring in the system is fully supervised directly by the central government under the Ministry of Home Affairs, so that the system cannot be accessed arbitrarily. These four indicators of resource communication, disposition and bureaucratic structure were successfully implemented by the Lampung Province Bappeda in implementing SIPD. The implementation of existing policies at Bappeda Lampung Province is in accordance with Law No. 23 of 2014

Keywords : Implementation, Local government, information system.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RISKA WIDI ASTUTI

Perkembangan teknologi di era sekarang sangat pesat dan dapat dijadikan peluang untuk pemerintah pusat dalam mengambil data yang cepat, tepat dan akurat dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan dalam hal pembangunan di daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang berbasis data, yang dapat diharapkan dapat menghasilkan data perencanaan yang akurat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bappeda Provinsi Lampung. Teori yang digunakan yaitu Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian tersebut yaitu: *Pertama*, pada indikator komunikasi, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki komunikasi yang baik antar OPD sehingga kejelasan tujuan sistem ini dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. *Kedua*, indikator sumber daya, fasilitas yang ada telah memadai, dan SDM yang ada cukup berkopeten. *Ketiga*, indikator disposisi atau sikap, penerapan sistem ini mendapat tanggapan yang positif, Bappeda Provinsi Lampung memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. *Keempat*, struktur birokrasi, pengawasan data dalam sistem sepenuhnya diawasi langsung oleh pemerintah pusat dibawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga sistem tidak dapat diakses sembarangan. keempat indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi ini berhasil dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam menjalankan SIPD. Implementasi kebijakan yang ada di Bappeda Provinsi Lampung telah sesuai dengan UU No 23 tahun 2014.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi, Pemerintah Daerah

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

RISKA WIDI ASTUTI

Skripsi

**Sebagai Salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Riska Widi Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021012**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Penguji : Budi Harjo, S.Sos, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Riska Widi Astuti
NPM. 1816021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riska Widi Astuti, dilahirkan di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 24 Juni 1999 dari pasangan Bapak Kasiyanto dan Ibu Rusmini. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak (TK) yaitu TK Pertiwi pada tahun 2005. Penulis melanjutkan ke sekolah dasar (SD) Sekolah Dasar Negeri 01 Adi Mulyo dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan tingkat pertama di MTsN 01 Mesuji dan lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya yakni sekolah menengah atas yang ditempuh penulis di SMAN 01 Simpang Pematang dan lulus tahun 2018. Selanjutnya ditahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-Unila berbagai kegiatan diikuti demi menunjang kapasitas diri penulis. Penulis menjadi bagian anggota biro 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019-2020. Selain itu Penulis juga memiliki prestasi dibidang akademik yaitu penulis berhasil lolos dalam Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Unila pada tahun 2021. Kemudian penulis pernah mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar pada tahun 2021 yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai peserta dari kabupaten Mesuji. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau pengabdian kepada masyarakat selama 40 hari di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Kemudian pada bulan Agustus 2021- Januari 2022 Penulis mengikuti Program Kampus Merdeka Belajar yang diselenggarakan pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama enam

bulan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

MOTTO

Dan Barang Siapa Menaruh Seluruh Kepercayaannya Kepada Allah (Tuhan),
Maka Dia Akan Mencukupi Mereka
(QS. At-Talaq:3)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS- Albaqarah:286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat teriring salam, selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'at nya di Yaumul Akhir.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Kedua orang tua saya yang tiada habisnya mendukung, memberi semangat dan mendo'akan saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Adik-Adikku tersayang Alm. Ahmad Adi Nata dan Citra Luckiati
3. Terimakasih juga untuk semua keluarga besar yang telah mendukung dan mendo'akan saya
4. Dan tidak lupa terimakasih untuk Ibu, Bapak dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan teman-teman saya

Terimakasih untuk semua yang telah mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 Di Bappeda Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku dekan Fisip Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.Ip, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, dan selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberi bimbingan berupa saran, kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.Ip, selaku penguji utama pada ujian skripsi, terimakasih atas masukan dan saran-sarannya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang bapak berikan dalam melaksanakan proses perkuliahan.
6. Bappeda Provinsi Lampung, Bapak M Roby Satria Pratama, S.T, selaku Kasubbag Program Sekertariat dan jajaran . terimakasih atas ketersediaannya untuk selalu membimbing dan terus memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
7. Kedua orang tua serta adikku tercinta yang telah mendukung, memberikan perhatian, semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada diri sendiri, Riska Widi Astuti. Terimakasih telah semangat melawan rasa malas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

9. Kepada keluarga yang selalu bertanya “kapan lulus”. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
10. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama kepada satu angkatan 2018, terkhusus kelas reguler B;
11. Kepada teman-teman seperjuanganku, Adis Ananda Putri, Ririn Anjarwati, Wini Ariyanti yang telah menemani perjuangan selama menjadi mahasiswa baru sampai sekarang. Terimakasih atas bantuannya selama perkuliahan, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan semoga bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.
12. Untuk teman-temanku, Okta Piana, Ferawati, Adelia Putri Ramadani yang telah menemani selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Terimakasih atas masukan dan dorongan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses dikemudian hari,, amin
13. Untuk teman-teman di semester akhir. Salsa, Tania, Adelia, Tasya, Diana, Hani. Terimakasih telah membantu memberikan semangat, motivasi serta informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Tomi terimakasih untuk dukungan, doa dan kesediaanya untuk menjadi teman, sahabat sekaligus seseorang yang selalu berusaha ada untuk penulis dari mulai pembuatan hingga penyelesaian skripsi ini;
15. Untuk teman-teman diluar Universitas, Melisa, Santi, Siti Aisyah, Eka Riskiana. Terimakasih atas waktu yang diberikan untuk selalu ada dan memberikan semangat serta energi positif untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman di kost aisyah, Rika Istiyarningsih, Sinta Maylanda, Dea Erin Mawarni yang menemaniku dikost dari menjadi mahasiswa baru sampai sekarang.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritiki yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung , 25 Juli 2022

Riska Widi Astuti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi	14
2.3 Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan	21
2.4 Tinjauan Tentang <i>E Government</i>	23
2.5 Tinjauan Tentang SIPD.....	25
2.6 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis Data	31
3.5 Informan.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Teknik Pengelolaan Data	37
IV. GAMBARAN UMUM	38
4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung	38
4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung.....	38
4.1.2 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Lampung	39

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung	40
4.1.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai.....	41
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	45
5.2 Hasil	45
5.2.1 Komunikasi	46
5.2.2 Sumber Daya.....	52
5.2.3 Disposisi.....	63
5.2.4 Struktur Birokrasi.....	66
5.3 Pembahasan.....	71
5.3.1 Komunikasi	71
5.3.2 Sumber Daya.....	73
5.3.3 Disposisi.....	76
5.3.4 Struktur Birokrasi.....	79
VI. PENUTUP	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Operator Pelaksana SIPD di Bappeda Provinsi Lampung tahun 2018- 2020	4
2.1 Penelitian Terdahulu	10
3.1 Informan Penelitian.....	33
4.1 Nama dan Struktur Jabatan	41
5.1 Nama Operator Pengisian SIPD di Bappeda.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 5.1 Portal SIPPKD.....	49
Gambar 5.2 Rapat Koordinasi Bappeda.....	50
Gambar 5.3 Pembentukan tim e-database SIPD	53
Gambar 5.4 Halaman Utama.....	54
Gambar 5.5 Halaman Depan	55
Gambar 5.6 Halaman Dashboard	55
Gambar 5.7 Menu Referensi (Sub Kegiatan).....	56
Gambar 5.8 Menu Referensi (Akun).....	57
Gambar 5.9 Menu Referensi (Sumber Dana).....	57
Gambar 5.10 Menu Referensi (Komponen).....	58
Gambar 5.11. Menu Rekening Penyusun SSH	58
Gambar 5.12. Menu Referensi SBU	59
Gambar 5.13. Menu Referensi HSPK	59
Gambar 5.14. Tampilan Input Pendapatan	60
Gambar 5.15. Belanja Operasi dan Modal	60
Gambar 5.16 Acuan Bappeda Provinsi Lampung.....	68
Gambar 5.17 Acuan Pendukung Bappeda Provinsi Lampung.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di daerah harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, komprehensif, dan sistematis. Dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat sebagai komunitas lokal harus dilibatkan karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dari tingkat bawah sampai pemerintahan pusat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri untuk mengoordinasikan perencanaan pembangunan adalah membangun sebuah wadah bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Sistem informasi yang dapat digunakan secara online dapat memudahkan bagi para pengguna untuk dapat mengakses data dimana dan kapan saja. Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok Bappeda Provinsi Lampung adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam membantu mencapai tujuan tersebut maka Bappeda Provinsi Lampung menggunakan system yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) merupakan sistem informasi yang digunakan Bappeda Provinsi Lampung sebelum menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPPKD dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan dari prinsip *good governance*. Namun dalam penggunaannya SIPPKD dianggap belum optimal

sehingga dalam membantu mencapai tujuan tersebut maka Bappeda Provinsi Lampung menggunakan system yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik.

Sistem informasi pemerintah daerah merupakan suatu *support system* dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *Good governance*. Secara umum definisi Sistem Informasi Pemerintah merupakan sebuah pengembangan dari Sistem Informasi secara umum yang memiliki definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009).

Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki definisi sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan alur kerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008). Hal inilah yang melandasi definisi dari *E-Government* sebagai penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *Good governance*.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik didaerah maupun dipusat. Serta meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi. Sehingga dapat membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh

daerah dalam mendukung pengembangan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.

Menurut Wahyudi dan Subando (2009) mengungkapkan bahwa, upaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen. Selanjutnya C. Laudon dan P. Laudon (2011) menyatakan bahwa sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen (mulai dari perencanaan, pemrakarsa, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian) dalam suatu organisasi.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan, peneliti menemukan permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan SIPD Bappeda Provinsi Lampung. Dimana terjadinya pergantian sistem. Sistem yang lama dinamakan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang sifatnya regional, dan sistem yang baru dinamakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sifatnya nasional. Dalam pelaksanaan pengisian didalam sistem, terdapat perbedaan penggolongan data serta SIPPKD yang ada di Bappeda Provinsi Lampung hanya memindahkan data dari server keSIPD. Dalam hal ini menyebabkan keterlambatan pengisian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan masih belum sinkronnya data Standar Satuan Harga (SSH) antara SIPPKD dan SIPD. Kemudian, operator pelaksana yang ada pada saat penginputan data dibatasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terlihat dari jumlah operator pelaksana yang hanya berjumlah 6 orang untuk menginput data satu provinsi Lampung bidang perencanaan. Adapun tabel pertumbuhan operator pelaksana penginputan data ke dalam SIPD adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Operator Pelaksana SIPD di Bappeda Provinsi Lampung 2018-2020

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah Operator	4 orang	6 orang	6 Orang

(Sumber :Diolah oleh peneliti, 2021. Dari Bappeda Provinsi Lampung)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksana penginput data mengalami permasalahan, sehingga pada akhirnya kendala tersebut membuat efisiensi waktu yang digunakan menjadi kurang baik. Lalu ketika terjadi kendala saat penginputan, Bappeda Provinsi Lampung mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dikarenakan SIPD milik Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: “Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung.”

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan pemerintahan, dalam hal ini khususnya ilmu pemerintahan, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung.

1.4.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bappeda Provinsi Lampung. Bahan informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindarkan adanya duplikasi pada tema penelitian (Idrus, 2009;52). Penelitian-penelitian yang berkaitan berkaitan penerapan *elektronik government* yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

a) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini disusun oleh Reni Kusuma Putri, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2021. Permasalahan yang terjadi ialah sebelum menggunakan SIPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami kesulitan dalam memilih usulan-usulan desa, sehingga berbagai informasi data usulan dari musrenbang desa yang masuk sulit untuk dikoordinasikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa sangat memudahkan bagi pemangku kebijakan untuk dapat memilah, merumuskan dan juga menyusun hasil

musrenbang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan dengan sangat efektif dimana seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang sudah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian.

- b) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang. Penelitian ini disusun oleh Nur Amanah, Mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada Tahun 2018. Permasalahan yang sering terjadi belum validnya data dan cenderung jarang diperbaharui, data pembangunan belum menjadi prioritas utama sehingga dalam proses penyusunan, penyajian datamasi menggunakan data lama. Permasalahan selanjutnya ialah lemahnya koordinasi antara Bappeda dengan OPD. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar capaian implementasi Permendagri No 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Bappeda Kota Serang.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Serang belum berjalan dengan baik. Karena dari hasil pengujian hipotesis yang menggunakan rumus T-test satu sampel didapat 61,7% dengan kata lain bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Serang kurang dari nilai yang dihipotesiskan sebesar 70%. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian.

- c) Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan daerah di Indonesia. Penelitian ini disusun oleh Fatria Ruhana tahun 2017. Permasalahan yang terjadi lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update, keterbatasan SDM, serta keterbatasan infrastuktur (akses Internet). Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Indonesia, dan bagaimana agenda perencanaan pembangunan Daerah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pemembangunan Daerah. Dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk perda dan keseluruhan tahapan ini sangat bergantung dari data dan informasi yang terdapat dalam SIPD. Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.

- d) Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini disusun oleh Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawong, Sofia E. Pengemanan pada Tahun 2021. Permasalahan yang terjadi ialah belum tersedianya data base yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan, data pembangunan daerah secara nasional sulit untuk dicari, belum terstandarisasinya kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang

bisa memunculkan beberapa kesalahan didaerah serta proses perencanaan dan penganggaran didaerah belum tepat waktu. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Balitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Hasil penelitian Implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahuu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Reni Kusuma Putri, judul penelitian “Impementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa sangat memudahkan bagi pemangku kebijakan untuk dapat memilah, merumuskan dan juga menyusun hasil	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian

	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang” Tahun 2021	musrenbang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan dengan sangat efektif dimana seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang sudah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya.	
2.	Nur Amanah, Judul Penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Serang belum berjalan dengan baik. Karena dari hasil pengujian hipotesis yang menggunakan rumus T-test satu sampel didapat 61,7% dengan kata lain bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian.

	Tahun 2018.	Negri No 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Serang kurang dari nilai yang dihipotesiskan sebesar 70%.	
3.	Fatria Ruhana, Judul Penelitian “Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan daerah di Indonesia”. Tahun 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pemembangunan Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk perda dan	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.

		keseluruhan tahapan ini sangat bergantung dari data dan informasi yang terdapat dalam SIPD.	
4.	Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawong, Sofia E. Pengemanan. Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Tahun 2021.	Hasil penelitian Implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

		pembuat kebijakan SIPD ini.	
--	--	-----------------------------	--

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65).

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68) Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan

pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*)

kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 1) Sumber daya Manusia.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”

- 2) Sumberdaya Anggaran Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is*

turn limit the quality of service that implementor can be provide to public". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3) Sumberdaya Peralatan Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed."

- 4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan

mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

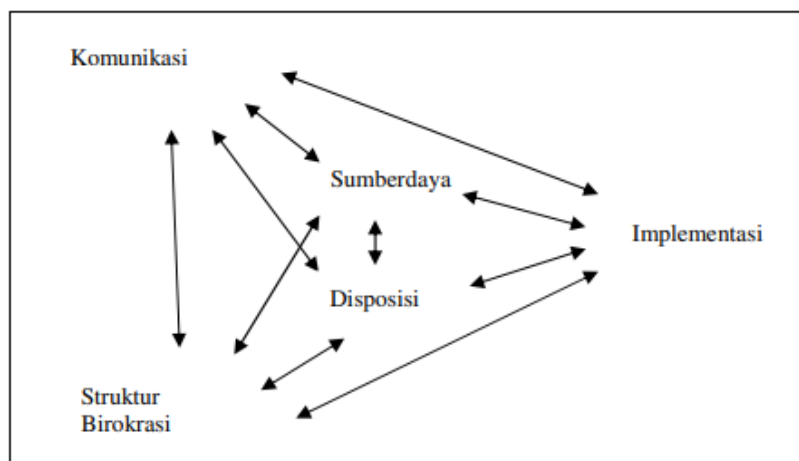
- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.



Gambar 2.1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

(Sumber : Subarsono,2011)

Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Gunakan mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa pengumpulan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi

program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.3 Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu, dan pada dasarnya merupakan suatu cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Arthur W. Lewis dalam buku (Sjafrizal :2014:24) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan sebagai :“suatu kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”

Pengertian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan : “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangua jjangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada dasarnya Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Memjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkatian dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dan untuk menghasilkan suatu perencanaan yang dianggap baik berikut beberapa ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Adanya evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memperhatikan dan memasukkan evaluasi (review) pada pembangunan sebelumnya, mengingat pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang berarti pembangunan yang akan direncanakan sangat ditentukan pula oleh hasil pembangunan sebelumnya. Dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui permasalahan yang dialami dan kendala yang dihadapi, sehingga bisa diatasi untuk datang .

2. Merinci dan prioritas dalam pembangunan

Pembangunan merupakan hal yang mendasar yang pada dasarnya diterjemahkan dari tujuan umum dibentuknya suatu Negara dan daerah, karena tujuan pembangunan lebih bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

3. Mempunyai Kaitan dengan Perencanaan dan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintah, maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait. Untuk itu antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis (Renstra) harus berhubungan dan terkait jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Tahunan.

4. Tersusun Secara Lengkap Termasuk Sektor Swasta

Karena sebuah perencanaan itu harus menyeluruh meskipun juga sektor swasta, dan tidak hanya mencakup sector pemerintah, tetapi juga swasata dan masyarakat secara keseluruhan.

2.4 Tinjauan Tentang *E-Government*

E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akun tabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010).

Dalam konsep *E-Government* dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang di kemukakan (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010) yaitu ;

1. *Government to Citizens* (Pemerintah ke Masyarakat) Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh : E-KTP
2. *Government to Business* (Pemerintah ke Pelaku Usaha) Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha.
3. *Government to Government* (Pemerintah ke Pemerintah) Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.
4. *Government to Employees* (Pemerintah ke Aparatnya) keadaan internal juga menjadi tempat diterapkannya *E-Government* dalam upaya kemudahan informasi atau akses berbagai tugas/hasil kerja dan lainnya.

Terdapat empat model tahapan pengembangan e-Government. Model ini terbagi atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat

integrasi data dan informasi. Adapun tahapan pengembangan tersebut adalah:

1. *Cataloging*, memiliki karakteristik berfokus kepada bagaimana pemerintah memberikan informasi dan mempresentasikannya ke dalam website. Biasanya, pemerintah akan memberikan informasi yang terbaru (*up to date*) kepada masyarakat. Jika perlu, pemerintah akan memberikan file yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat.
2. *Transaction*, memiliki karakteristik bahwa pemerintah terhubung langsung dengan sistem internal pemerintah melalui antar muka dan memberikan jalan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kepada pemerintah secara elektronik

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat disuatu Negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu Negara, antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumberpendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang kepentingan

2.5 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka di perlukannya sebuah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Data-data SIPD tersebut bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan hal ini juga didasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Pemerintah daerah bertugas untuk mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data SIPD. Dan penerapan ini juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut ini :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Membangun rumah legal *database* pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar *input* untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

3. Dan berguna untuk instrument pengelolaan data dan informasi dan evaluasi capaian perperiode dan penelaahan RTRW.
4. Dan instrument analisis isu-isu strategis dan analisis gambaran umum kondisi daerah dan ekonomi dan keuangan daerah.

Berikut ini beberapa manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari segi pengguna yaitu sebagai berikut ;

1. Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota : SIPD menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah;
2. Bagi Kemendagri : SIPD menjadi system penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah;
3. Bagi Kantor/Lembaga : SIPD menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah;
4. Masyarakat : SIPD merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Penyusun SIPD yang terdiri dari seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tim bertugas untuk :

1. Melakukan persiapan kegiatan penyusunan dan pengembangan data dan Informasi SIPD;
2. Menghimpun dan mengentry data ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Mengevaluasi data dan informasi SIPD;
4. Melaksanakan pengolahan dan analisa data SIPD;
5. Melaksanakan pembahasan dengan melakukn presentasi, konsultasi dan diskusi internal Tim POKJA.

Setelah data diperoleh selanjutnya di input secara langsung secara online ke situs <https://sippd.lampungprov.go.id/>

Tahapan proses perencanaan dalam pengisian SIPD ialah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
2. Menyusun Rencana Kerja (RENJA), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 tahun.
3. Menyusun pra Rencana Kerja Anggaran (RKA), merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program, rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, rencana pendapatan dan kegiatan SKPD.
4. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Profon Anggaran Sementara (PPAS)
5. Mengisi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD).
6. Mengisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.6 Kerangka Pikir

Sistem data di masa globalisasi dikala ini tumbuh sangat pesat dengan Teknologi Komputer yang terus menjadi mutahir dalam waktu yang relatif pendek. Perihal ini dibuktikan dengan informasi yang dikeluarkan oleh Gartner Market Databook (Databook, 2018) yang menyatakan jika ditaksir pengeluaran investasi Teknologi Data global pada tahun 2022 hendak menggapai \$4,2 triliun. Ini menampilkan kalau baik Teknologi Data ataupun Sistem Data telah menjadi perihal yang sangat berarti di tiap bidang kerja ataupun ditiap elemen warga. Akibat perubahan teknologi yang semakin menggerus dunia, ini menjadi urgensi dalam mempertahankan daya saing (Wartini & Yasa, 2016).

Dalam rangka mewujudkan informasi akurat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam perencanaana serta penganggaran, penggunaan teknologi merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Semenjak diterapkan Permendagri No 70 Tahun 2019,

percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali guna mencapai tujuan yang telah di harapkan (Ekaputra, 2021).

Dikarenakan observasi awal yang didapat peneliti, bagi pelaksana aplikasi SIPD pada Bappeda Provinsi Lampung dalam menerapkan aplikasi ini tidaklah gampang. Salah satu kendala yaitu terjadinya kendala didalam penginputan data. Dimana *step by step* penginputan data dilakukan secara online. Observasi awal yang peneliti dapatkan juga menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Bappeda Provinsi Lampung merasa belum siap akan penggunaan aplikasi yang berbasis web ini. Oleh sebab itu, peneliti menduga permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dalam mengelola aplikasi SIPD peneliti menggunakan teori Edward III sebagai Guide Analysis dalam penelitian ini. Edward III mengajukan 2 pertanyaan yang berguna untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

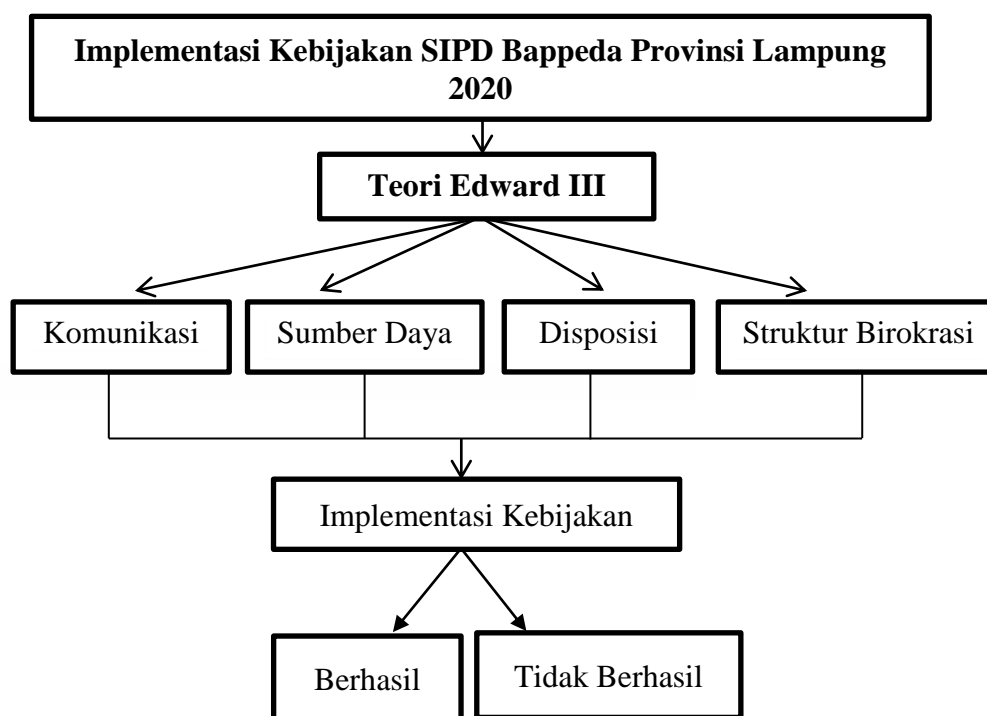
Berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, Edward III menggunakan 4 variabel diantaranya:

- a) Komunikasi,
- b) Sumber Daya,
- c) Disposisi
- d) Struktur Organisasi

sebagai variabel yang akan dikaji dan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Adapun uraian dari teori Edward III adalah:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi yaitu Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar



Gambar 2. Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . Menurut Bogdan dan Taylor dalam Sinambela (2012:4) metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dibedakan atas 2 jenis yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle dalam Emzir (2011:2) penelitian kualitatif adalah berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pengalaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).

Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan, memahami, dan menggambarkan tentang bagaimana Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan menjadi acuan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui proses pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian amat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak mengalami hambatan mengenai melimpahnya volume data yang didapatkan, namun tidak sejalan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan memiliki tujuan (*purposive*). Tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Alasan peneliti karena lembaga tersebut termasuk pengguna Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang serta tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah

dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

3.4.1 Data Primer

Dalam Sinambela (2012:157) Data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data primer dilakukan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan terarah karena sudah direncanakan oleh peneliti dan dari seluruh informasi yang didapat tidak seluruhnya digunakan, karena terkadang terdapat beberapa informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

3.4.2 Data sekunder

Dalam Sinambela (2012:159) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis yang diperoleh dari sumber buku dan majalah ilmiah, arsip-arsip pribadi, foto, berita, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung. sebagai penunjang dari data primer.

3.5 Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *stratifikasi sampling* dalam menentukan informan. *Stratifikasi sampling* adalah teknik penentuan informan berdasarkan strata atau hirarki pada masyarakat yang heterogen. Alasan menggunakan teknik ini dikarenakan informan berupa pegawai dinas pendidikan dan masyarakat yang memiliki strata berbeda – beda , kemudian peneliti juga menitik beratkan pada informasi terkait Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020 pada Bappeda Provinsi Lampung. Adapun Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Jabatan	Nama	Umur
1.	Koordinator Sub Bidang program Sekertariat	M. Roby Satria P	36 tahun
2	Staf Sub Bidang program Kesekretariatan Bappeda Provinsi Lampung.	Suharjanto, S.Kom	45 tahun
3	Fungsional Perencana Ahli Pertama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gladytha Gunawan, S.STP, M.Si	28 Tahun
4	Analisis Perencanaan Strategis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ria Primadeka, S.E	36 Tahun
5	Analisis Standar Harga Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Kurnia Adhari, S.Kom, M.Ti	38 Tahun

(Sumber: Hasil olahan penulis, 2021. Dari Bappeda Provinsi Lampung)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton dalam Emzir (2011: 65) Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan melalui deskripsi kegiatan kerja lapangan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan deskripsi rinci termasuk konteks di mana penelitian dilakukan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Lampung. Peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui nama, usia, jabatan, tugas/kegiatan, dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

3.6.2 Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab terbuka dan meneliti hasil tanggapa mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang mendalam, terperinci, dan gambaran yang jelas mengenai Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai data yang bersumber dari bahan dan

dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis atau catatan program, dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk tanggapan terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Lampung

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biglen dalam Sinambela (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat logis.

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan maupun data sekunder yang berkenaan dengan kekerasan seksual pada anak yang terjadi sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2011:129-135) adalah sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan,

membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

Reduksi data dilakukan pada data primer maupun sekunder dan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan data dan informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan oleh karenanya diperlukan pemilihan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Peneliti dengan itu melakukan reduksi data dari informan yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian mengumpulkan data mengenai Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2020.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Display data merupakan tindakan peneliti untuk menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian yang memperbolehkan pendeskripsian dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan membuat peneliti terbantu dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. Peneliti mengumpulkan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan pada penyajian data dengan cara data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3.7.3 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, memelihara kejujuran dan kecurigaannya (*skeptisme*) atau teruji kepercayaan dan kekuatannya yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan fokus penelitian ini. Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

3.8 Teknik Pengelolaan Data

3.8.1 Editing

Penulis akan memeriksa hasil wawancara dengan narasumber untuk menjamin validitas agar data dapat digunakan ditahap selanjutnya. Tahap editing dalam penelitian ini adalah menyajikan hasil wawancara hal ini dapat berupa kalimat yang kurang baku dan disajikan dengan kalimat yang baku

3.8.2 Interpretasi

Tahap yang diperoleh dari hasil wawancara dideskripsikan melalui penjelasan-penjelasan sehingga dapat diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung

Bappeda Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, dan Permendagri Nomor 185 Tahun 1980, serta Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan, antara struktur Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Bappeda Tingkat I Lampung” menjadi “Kepala Bappeda Provinsi Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil Ketua Bappeda pada eselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat Data Elektronik) ke dalam Bappeda, (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian” pada Bappeda dan (5) dibentuknya Balitbang Provinsi. Tetapi, pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009, Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali

yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Bappeda pada Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.1.2 Visi Misi Bappeda Provinsi Lampung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung saat ini dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung perlu disusun rumusan visi dan misi.

Berikut visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Provinsi Lampung :

Visi

Yaitu rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, Dan Sejahtera)

Misi

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan Bersama

4.1.3 Tugas dan Fungsi Bappeda

Menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 bagian kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 777 sebagai berikut :

Tugas

1. Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Fungsi

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
5. Penyelenggaraan administrasi
6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

4.1.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Bappeda Provinsi Lampung

Adapun nama dan struktur jabatan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nama dan Struktur Jabatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Mulyadi Irsan, M.T	Kepala Badan
2.	Dra. Evie Fatmawaty, M.Si	Sekretaris
3.	Zakiah Drajat, S.I.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Siti Masitoh, S.E	Staff
5.	Agus Guntur Sukmono, S.E	Kasubbag Keuangan dan Aset
6.	Syahril Jaya Saputra, S.T	Staff
7.	M. roby Satria P, S.T	Kasubbag Program Sekertariat
8.	Ratih Widiyanti, S.E	Staff
9.	Ir. Ahmad Lianurzen, M.T	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan
10.	Riya Soneta, S.Kom	Kasubbid perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I
11.	Muhammad Fauzi, S.T, M.E	Kasubbid perencanaan infrastruktur dan pengembangan

		wilayah II
12.	Merylia, ST,MT,MSc	Kasubbid perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III
13.	Bobby Irawan, S.E, M.Si	Kabid Perencanaan Perekonomian
14.	Haryo Wicaksono, S.E	KasubbidPerencanaan Perekonomian I
15.	Dharma Saputra, S.E, M.H	Kasubbid Perencanaan Perekonomian II
16.	Naomi Setyawati, S.E	Kasubbid Perencanaan Perekonomian III
17.	Eka Yuslita Dewi, S.T, M.T	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
18.	Prayudi Aribowo, S.STP	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia I
19.	Silfa Gusman, S.E	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia II
20.	Ridwan Syaifuddin, S.E., M.Si	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia III
21.	Ir. Marlina Emidianti, M.Si	Kabid Perenc Makro, Pengendalian Evaluasi Pembangunan
22.	Era Jayanti, S.STP, MM	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
23.	Catur Makmudi, S.Hut, M.I.L	Kasubbid Perencanaan Makro
24.	Salisiara, S.E	Kasubbid Pengendalian Kebijakan
25.	Belli Pahlupi, S.T, M.T	Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung, 2022)

Adapun susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kebijakan; dan
 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi:
1. Sub Bidang Pertanian;
 2. Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
 3. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan.
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Sub Bidang Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Data (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 2. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4. Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
7. Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, serta telah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pada sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Bappeda Provinsi Lampung telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Indikator komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Lampung untuk penerapan SIPD sudah dianggap cukup baik, hal tersebut dapat dilihat bahwa Bappeda melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi sebelum diterapkannya sistem tersebut. Dalam hal ini Bappeda telah memahami apa maksud dari penerapan aplikasi SIPD ini. Bappeda juga sangat aktif dalam melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung dalam implementasi kebijakan, dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan data, menginput data perencanaan, dan dapat menselaraskan antara data yang satu dengan data yang lainnya agar menjadi lebih terkoordinir, hasil dari komunikasi tersebut Bappeda dapat menjalankan sistem sampai dengan sekarang ini dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Lampung sudah cukup lengkap dan didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang ada

disub bagian program yang berkualitas serta berpendidikan. Agar sebuah tujuan dapat berjalan dengan baik dan maksimal maka dibutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dari pendidikannya.

3. Disposisi

Pada indikator disposisi atau sikap, dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mendapat tanggapan yang baik dari para OPD. Sikap yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Lampung menjadikan pemimpin yang dalam pengambilan kebijakan, keputusan selalu melibatkan pegawainya dan memiliki komitmen serta tanggung jawab untuk tercapainya sebuah tujuan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terkait sistem informasi pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah tidak dapat melakukan perbaikan ketika sistem telah di tutup, hal tersebut dikarenakan pengawasan dalam sistem ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pengawasan dilampung terpusat di BPKAD Provinsi Lampung.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, Bappeda Provinsi Lampung dalam menjalankan SIPD peneliti memberikan saran untuk dikemudian hari dapat memanfaatkan keilmuan yang ia miliki dan memberikan tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diampunya. Hal ini agar hasil dari tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai secara maksimal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005 Hlm.37.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Budiman NPD, Ilmu Pengantar Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm.33
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali
- I Gede Pitana & Putu G, Gayatri, Sosiologi Pariwisata, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2005, Hlm.76.
- Ina Kencana Syaie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 133.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.30-34.
- Kansil CST dan Cristine, 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.83.

- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 81.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 286.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 168-169.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sinambela, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Sufi, Wasiah, dan Dwi. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*. Vol 9, No, 2 Januari 2017, Hal 102-108.
- Ruhana,Faria, Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*. Vol 4, No 2/Desember2017
- Karundeng, Afrilia Bella. Dkk. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*. Vol 1, No 2 tahun 2021
- Putri, Reni Kesuma, 2021. “Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Amanah,Nur, 2018. “implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) di badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Serang”. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

WEB

<https://lampungprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>, diakses pada 13 Febuari 2022

<https://www.sippkd.lampungprov.go.id/site/beranda>, diakses pada 15 Februari 2022

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Keputusan Gubernur Lampung, nomor G/95/VL.01/HK/2020. Tentang pembentukan tim pengelola e-database sistem informasi pemerintahan daerah provinsi lampung tahun 2020

Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah